

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA




PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
TRIWULAN I PERIODE JANUARI – MARET
TAHUN 2024

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I 2024
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

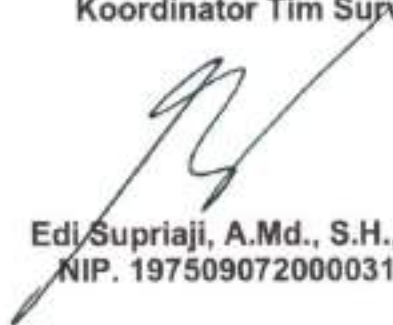
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Disahkan di Surabaya, 2 April 2024

 Ketua


Dr. Istiwibowo, S.H., M.H.
NIP. 195710111985031001

Koordinator Tim Survei


Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.
NIP. 197509072000031002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan keadilan yang diperoleh dalam proses peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, baik dalam tingkat banding maupun pada pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama.

Meskipun fungsi utama pengadilan memberikan pelayanan publik, namun dalam pelaksanaannya pelayanan publik yang diberikan mencitrakan kredibilitas yang belum baik, dimana pelayanan yang diberikan seringkali dipersepsikan identik dengan prosedur yang tidak jelas dan berbelit-belit, persyaratan yang rumit dan tidak masuk akal, biaya pungutan di luar ketentuan, dan ketidakpastian penyelesaian.

Citra tersebut sangat erat kaitannya dengan karakteristik pelayanan publik itu sendiri, dimana pelayanan publik cenderung bersifat monopoli dan bersifat mengatur sehingga sangat jauh dari mekanisme pasar dan persaingan. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pengadilan untuk memperbaiki kualitas layanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan saat ini masih belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui lembaga pengaduan masyarakat (Komisi Ombudsman), media massa maupun aplikasi pengawasan (Siwas), maupun Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pengadilan, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.

Selain pelaksanaan Akreditasi pada semua lingkungan peradilan, produk unggulan yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan implementasi dari tujuan pelayanan kepada para pencari keadilan yaitu layanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Lebih jauh adalah mengurangi peluang terjadinya praktek-praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan dimaksud adalah dengan mengadakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai pedomannya yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

B. Tujuan dan Sasaran

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat/pengguna layanan sebagai pengguna layanan dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh pegawai/pelaksana//petugas layanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; dan
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih kreatif dan inovatif.

C. Rencana Kerja

Pelaksanaan pengukuran/survei kepuasan masyarakat (SKM) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini dilaksanakan Pada bulan Januari-Maret 2024.

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik *simple random sampling*, yaitu memilih responden secara acak dengan cara mengirimkan link/alamat survei (*online*) ke nomor/kontak telepon setiap pengguna layanan yang telah

menerima layanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan memberikan keleluasaan kepada sampel tersebut untuk mengisi kuisisioner atau tidak;

2. Tim survei membuat instrumen berupa angket/kuesioner, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Tim survei mencetak dan menggandakan kuesioner yang telah disusun dan menentukan jadwal pelaksanaan survei;
3. Tim survei melakukan survey sesuai jadwal;
4. Tim survei memeriksa kuesioner, jika ditemukan kuesioner yang tidak terisi lengkap, maka kuesioner tersebut tetap diikutkan dalam analisis data;
5. Tim survei melakukan konversi kuesioner, memasukan jawaban kuesioner dan menganalisis data dalam dokumen Laporan; dan
6. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk statistik serta analisis deskriptif.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil melalui instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Populasi penelitian ini adalah semua pengunjung di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan para pihak berperkara di Pengadilan TUN di bawah Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sampel pada penelitian ini diperoleh dari pengunjung yang mengisi kuisisioner SKM dari website PTTUN Surabaya dengan alamat "bit.ly/surveipttunsurabaya".

B. Variabel Pengukuran SKM

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain:

1. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

5. Perilaku Pelaksana

Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

6. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

7. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis layanan.

8. Biaya

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerimaan layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya di terapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data pada pengukuran tingkat Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ini menggunakan analisis deskriptif. Kesembilan ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 9 pertanyaan, dan empat *option* jawaban. Adapun penilaiannya menggunakan *Skala Likert*, dengan skor 1 sampai dengan 4.

Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1
Kategori Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

BAB III
HASIL SURVEI MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Kuesioner yang terkumpul dan terisi yaitu 16 kuisisioner. Berdasarkan survei kepuasan pengguna layanan/masyarakat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa tingkat **Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebesar 3,69 / 92,19** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 88,31 – 100).

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tersebut diatas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 5
Rata-rata Skor dan Peringkat Ruang Lingkup Pelayanan

NOMOR RESPONDEN	NILAI UNSUR PELAYANAN									N I L A I I K M
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	3	4	3	3	4	4	3	
7	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
8	3	4	3	4	3	3	3	4	3	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	3	4	4	4	3	3	3	4	4	
11	4	4	3	4	4	3	3	4	3	
12	4	3	3	4	3	3	3	4	3	
13	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
14	4	4	3	4	3	3	4	4	4	
15	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
16	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
Σ Nilai Per Unsur	59	61	55	64	56	57	58	64	57	
\bar{x} NRR Per Unsur	3,69	3,81	3,44	4,00	3,50	3,56	3,63	4,00	3,56	3,69
% NRR Trtmbng	92,19	95,31	85,94	100	87,50	89,06	90,63	100	89,06	92,19

A. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan. Dari hasil analisis diperoleh data mayoritas responden menyatakan "Sangat Sesuai" (**68,75 %**) dengan rata-rata skor sebesar **3,69 / 92,19** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup prosedur berada pada kategori **Sangat Baik**.

B. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif. Dari hasil analisis diperoleh data mayoritas responden (**81,25 %**) menyatakan "Sangat Mudah" dengan rata-rata skor sebesar **3,81 / 95,31** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup persyaratan berada pada kategori **Sangat Baik**.

C. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis, seluruh responden menyatakan bahwa waktu pelayanan "Cepat" dengan rata-rata skor sebesar **3,44 / 85,94** berada pada interval skor 3,0644 – 3,532 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup waktu pelayanan berada pada kategori **Baik**.

D. Biaya/Tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara layanan. Dari hasil analisis diperoleh data bahwa semua responden (**100%**) menyatakan bahwa biaya/tarif gratis dalam mengurus atau memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan rata-rata skor sebesar **4,00 / 100,00** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian pendapat Pengguna Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori **Sangat Baik**.

E. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh mayoritas responden (50%) menyatakan "Sesuai" dengan rata-rata skor sebesar 3,50 / 87,50 berada pada interval skor 3,0644 – 3,532 kategori "**Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan berada pada kategori **Baik**.

F. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh data bahwa seluruh responden menyatakan kompetensi pelaksana "Sangat Kompeten" dalam memberikan pelayanan dan rata-rata skornya sebesar 3,56 / 89,06 berada pada interval 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori **Sangat Baik**.

G. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh bahwa mayoritas responden memandang "Sangat Sopan dan Ramah" dengan perilaku pelaksana pelayanan (62,5 %) dengan rata-rata skor sebesar 3,63 / 90,63 berada pada Interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada kategori **Sangat Baik**.

H. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya. Dari hasil analisis diperoleh mayoritas responden (100%) menyatakan penanganan pengaduan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya "Dikelola dengan Baik", dengan rata-rata skor sebesar 4,00 / 100,00 berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penanganan pengaduan, saran dan masukan berada pada kategori **Sangat Baik**.

I. Kualitas Sarana dan Prasarana

Kualitas sarana dan prasarana merupakan kadar tingkat baik atau buruknya alat/kelengkapan dan penunjang utama pelayanan masyarakat. Dari hasil analisis diperoleh mayoritas responden (56,25%) menyatakan kualitas

sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya "Sangat Baik", dengan rata-rata skor sebesar **3,56 / 89,06** berada pada interval skor 3,5324 – 4,00 kategori "**Sangat Baik**". Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup kualitas sarana dan prasarana berada pada kategori **Sangat Baik**.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data survei melalui penyebaran kuesioner ini, disimpulkan bahwa tingkat Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebesar **3,69 / 92,19** pada interval 3,5324 – 4,00 / 88,31 – 100,00 dan berada pada katagori **"SANGAT BAIK"**. Adapun nilai rata-rata pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Lingkup prosedur pada kategori Sangat Baik (NRR **3,69 / 92,19**);
2. Lingkup persyaratan pada kategori Sangat Baik (NRR **3,81 / 95,31**);
3. Lingkup waktu pelayanan pada kategori Baik (NRR **3,44 / 85,94**);
4. Lingkup biaya/tarif pelayanan pada kategori Sangat Baik (NRR **4,00 / 100,00**);
5. Lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan pada kategori Baik (NRR **3,50 / 87,50**);
6. Lingkup kompetensi pelaksana pada kategori Sangat Baik (NRR **3,56 / 89,06**);
7. Lingkup perilaku pelaksana pada kategori Sangat Baik (NRR **3,63 / 90,63**);
8. Lingkup penanganan pengaduan pada kategori Sangat Baik (NRR **4,00 / 100,00**); dan
9. Lingkup Kualitas Sarana dan Prasarana Publik pada kategori Sangat Baik (NRR **3,56 / 89,06**).

Tingkat Kepuasan Masyarakat pengguna layanan pengadilan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya paling tinggi berada pada ruang lingkup Biaya/Tarif dan lingkup Penanganan Pengaduan dengan tingkat Nilai Rata-Rata 4,00/100,00. Sementara tingkat Nilai Rata-Rata terendah ada pada lingkup Waktu Pelayanan dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, akan tetapi masih berada dalam kategori Baik.

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, hendaknya tetap mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah dinilai Sangat Baik. Berdasarkan hasil survei ini, ruang

lingkup Waktu Pelayanan dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan perlu dikaji kembali pelaksanaannya karena memiliki nilai yang lebih rendah dari unsur penilaian lainnya, walaupun masih masuk dalam kategori Baik.

Perbaikan pada unsur waktu pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dilakukan dengan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut, sebagai berikut:

Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1.	Waktu Pelayanan	Memberikan pengarahan terkait Waktu Pelayanan dan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	April s.d. Juni 2024	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris
2.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan			

Demikian Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini dibuat untuk dipergunakan sebagai landasan dalam peningkatan dan perbaikan layanan masyarakat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

**DAFTAR RESPONDEN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

No.	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur	No. HP	E-Mail	Alamat	Pekerjaan	Pendidikan	Layanan
1	Tiara Aprilia W.P.	Perempuan	19	082136513279	Tiaraaprilia2804@gmail.com	Perum the queen blok k6 simogitang prambon	Mahasiswa	S1 (Strata I)	Pembinaan dan Pengawasan
2	Rio Alfidino Yosevain	Laki-laki	22	081336040895	rioaldino217@gmail.com	Kedung mangu selatan 4/ Surabaya	Mahasiswa	S1 (Strata I)	Pembinaan dan Pengawasan
3	Alyssa Brina Azzahra	Perempuan	19	081232354705	azzahralyssa@gmail.com	Sidoarjo	Mahasiswa	S1 (Strata I)	Pembinaan dan Pengawasan
4	Zainur Ridlo	Laki-laki	32	081850280282	Lawyers.zr@gmail.com	Surabaya	Advokat	S1 (Strata I)	Informasi & Pengaduan
5	A Tajul Arifin	Laki-laki	36	081935105387	Aatajul@gmail.com	Sumenep	Advokat	S2 (Strata II)	Penyelesaian Perkara
6	Sodik S.H.	Laki-laki	42	081327170925	odik.law@gmail.com	Bantul, Yogyakarta	Advokat	S1 (Strata I)	Penyelesaian Perkara
7	Edi Sumarmo, S.H.	Laki-laki	60	081259479673	Gantholarya@gmail.com	Dr Sutomo 8/56 Kel karangwaru KC/kab Tulungagung Jatim	Advokat	S1 (Strata I)	Informasi & Pengaduan
8	Moch. Wahid Hasym	Laki-laki	38	082245619606	wahid100886@gmail.com	Nganjuk Jawa Timur	Lainnya	S2 (Strata II)	Penyelesaian Perkara
9	Daniel	Laki-laki	52	081267356367	danielhsagian@1867@gmail.com	Jambi	Wirausaha	S1 (Strata I)	Penyelesaian Perkara
10	Nasmiid Idris, S.H.	Laki-laki	54	081287566555	nasmiidlaw@gmail.com	Jl. Griya Kebranon Utara AL-42 Kota Surabaya	Advokat	S2 (Strata II)	Penyelesaian Perkara
11	Harjani, S.H.	Perempuan	52	08113660396	harjanihukum@gmail.com	Berbek Kab. Nganjuk	PNS/ASN	S2 (Strata II)	Penyelesaian Perkara
12	Drajat Sukmono	Laki-laki	56	08185900052	drajatsukmono993@gmail.com	Jl. ngagel dadi 5/42	Advokat	S1 (Strata I)	Informasi & Pengaduan
13	Harianto	Laki-Laki	55	081234117588	hariantoug87@gmail.com	Jl. Veteran 10 Nganjuk	Wirausaha	S2 (Strata II)	Penyelesaian Perkara
14	Amin Zali	Laki-laki	53	082140797087	aminzaliadv@gmail.com	Surabaya	Advokat	S1 (Strata I)	Informasi & Pengaduan
15	Setyo Hendarto	Laki-Laki	63	08123152990	omihen60@gmail.com	Banjarkemantren Rt.10 Rw.01 Kec. Buduran Sidoarjo	Wirausaha	S2 (Strata II)	Informasi & Pengaduan
16	Dion Sukma M	Laki-laki	39	081223211822	dionsukmamahaendra@gmail.com	Jalan Pekunden Tengah Semarang	Advokat	S2 (Strata II)	Penyelesaian Perkara

